



Peduli Sampah

SEKDA Pemprov DIY pada 26 Juni 2024 lalu menyebutkan 5.000 ton masih tertinggal di depo-depo, belum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meski pemerintah daerah sudah bekerja keras memindahkan ribuan ton ke tempat semestinya, namun persoalan sampah khususnya di Yogyakarta masih belum selesai hingga hari ini.

Besarnya kuantitas sampah dan tipisnya kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah selama ini menjadi penting untuk dijadikan diskursus. Urusan sampah pasti bisa diatasi, ketika semua orang peduli terhadap persoalan residu peradaban ini.

Regulasi Sampah

Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah pusat memiliki wewenang menetapkan kebijakan, strategis, norma, standar dan kriteria pengelolaan sampah. Pemerintah Pusat juga punya wewenang mengembangkan kerjasama kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah antardaerah, serta kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah. Sedang Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan pemrosesan akhir sampah.

Masalah sampah

Ketika di lapangan, sampai sekarang persoalan sampah masih dilematis. Indonesia begitu luas, sebagian besar berbentuk perairan. Jumlah penduduk juga tidak bisa dikatakan sedikit. Konsekuensinya sampah ada di mana mana sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Sebagai contoh, kita bisa menemukan tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai, danau, laut, hutan dan sebagainya. Masyarakat mungkin ada yang bingung, kewenangan siapa sampah yang di jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten?

Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beraacun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan yang lalu menjelaskan, kewenangan pelaksanaan pengelolaan sampah hampir sepenuhnya

Anas Hidayat

berada di pemerintah kabupaten/kota. Sebagai ujung tombak pengelolaan sampah diharapkan kabupaten/kota akan terpacu untuk segera meningkatkan peran dan kapasitasnya.

Jika menelisik dari alokasi anggaran pengelolaan sampah di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, umumnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengelola sampah masih sangat minim dan tidak sampai

asah melalui berbagai program pemerintah yang sudah berjalan. Banyak kegiatan berjalan yang bisa diberi muatan sisipan program tentang sampah ini. Kegiatan yang sudah regular dan populer di masyarakat antara lain Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Karang Taruna, kepeduan atau pertemuan warga. Semua itu bisa menjadi media strategis untuk membangun lingkungan hijau dan kampung sehat.

Sekadar contoh, buka media sosial, kita bisa melihat berbagai gerakan yang bisa ditiru. Seperti di Singapura sampah yang sudah diolah dijadikan bahan reklamasi. Mungkin tidak perlu harus studi banding ke luar negeri. Di Bali, ada satu kelompok swadaya – Sungai Watch. Digawangi oleh tiga orang bule Jerman, mengubah sampah menjadi komoditas sandal dan furnitur.

Banyaknya kelompok di atas adalah modal yang bisa digerakkan. Peduli adalah kata kunci. Kepedulian merupakan pentil atau karakter masyarakat terhadap persoalan bersama. *Spiritual leader* dan *informal leader* sering lebih efektif mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat. Mereka juga harus dilibatkan. Lingkungan hijau, lingkungan sejuk, lingkungan bersih, bukan mustahil lagi dapat terwujud kalau semua bergerak, semua peduli, semua rukun.

Rukun agawe santoso, karena sampah bisa menjadi komoditas yang mengumani, tanpa harus dengan teknologi yang ribet, kecuali mentalitas yang tangguh dan peduli. Ayo Bergerak...! ☑

**) Prof Drs Anas Hidayat GDM
 MBA PhD, Direktur Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opnikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.



KR-JOKO SANTOSO

1% dari jumlah APBD. Bila dievaluasi lebih lanjut, maka ada korelasi yang kuat antara banyaknya sampah berceceran di jalan dan fasilitas umum dengan alokasi anggaran yang minim. Dalam artian beban berat pengelolaan sampah seringkali tidak diimbangi oleh anggaran yang optimal. Dengan melihat dari aspek keuangan ini saja sudah jelas jawabannya, kenapa masalah sampah di daerah tidak selesai-selesai.

Pedulih Sampah

Memang betul bahwa urusan sampah bukan beban pemerintah semata. Masyarakat juga punya tanggungjawab untuk ikut bermitra dengan pemerintah. Sampah adalah masalah bersama. Kepekaan masyarakat kepada urusan sampah adalah sebuah keniscayaan, makanya harus selalu di-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005